

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasca perang dunia ke dua, terjadi perang sipil di berbagai belahan dunia yang salah satunya terjadi di Semenanjung Korea yakni Perang Korea antara tahun 1950 - 1953. Sebagai akibat dari perang tersebut, antara setengah sampai dua juta penduduk sipil meninggal dan sepuluh juta lainnya menjadi pengungsi (Myung, Jaffe, terj., Christine, 2013 ; 26-27). Semenanjung Korea juga terpecah menjadi dua negara yang terpisah yakni DPRK (*Democratic People of Republic Korea*) dibagian Utara dan ROK (*Republic of Korea*) dibagian Selatan. Perang korea sendiri dimulai pada tahun 1950 dan berakhir pada tanggal 27 Juli 1953 setelah adanya perjanjian gencatan senjata oleh kedua belah pihak untuk sepakat menghentikan peperangan. Kerena secara resmi kedua kubu belum memiliki perjanjian damai dan hanya merupakan perjanjian gencatan senjata, maka secara teknis perang masih berlangsung di antara kedua belah pihak hingga saat ini (Worden, Bruce, 2008 ;44-45).

Jika dilihat melalui perspektif sejarah perang, Perang Korea merupakan bentuk *proxy war* antara Amerika Serikat (Liberal) dengan Uni Soviet (Komunis) yang terjadi pada masa perang dingin. Pemisahan Semenanjung Korea menjadi dua wilayah yang terpisah merupakan inisiatif dari Amerika Serikat dan Uni Soviet pada akhir perang dunia II yang ditandai oleh garis 38⁰ paralel yang memisahkan wilayah Selatan dan Utara (Myung, Jaffe, terj., Christine, 2013 ; 28). Oleh karenanya, tidak mengherankan jika pada saat itu baik pihak Selatan maupun Utara masing-masing sangat kuat dipengaruhi oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Berakhirnya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet di tahun 1989, tidak serta merta mempengaruhi situasi hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Ketegangan dan provokasi oleh kedua pihak masih terus berlangsung. Kebijakan proliferasi nuklir dan pengembangan kapasitas persenjataan oleh Korea Utara menjadikan

intensitas Konflik semakin besar dan cenderung fluktuatif (Worden, Bruce, 2008: 54-56 ; Hampson, Croker, Aall, Webel & Galtung, Ed. 2007: 99).



Gambar 1. 1 Peta Wilayah Korea Selatan dan Korea Utara yang Terpisah Garis 38⁰ Paralel

Sumber: *The Korean War*. 11 Februari 2018

Keadaan yang fluktuatif tersebut mengakibatkan kondisi keamanan di Semenanjung Korea semakin tidak menentu sehingga semenanjung Korea tetap menjadi wilayah yang rawan akan terjadinya perang dimasa yang akan datang. Selain itu, tidak menutup kemungkinan hal tersebut juga akan mengakibatkan ancaman bagi stabilitas keamanan baik regional maupun global. Konflik di Semenanjung Korea memiliki latar belakang cukup rumit yang melibatkan elemen politik, ideologi, dan militer. Konflik menjadi semakin kompleks ketika formasi elemen dan adanya kenyataan bahwa konflik Korea Utara dan Selatan turut dipengaruhi oleh sistem internasional dengan adanya keterlibatan negara besar seperti Tiongkok, Rusia dan Amerika Serikat (Bo-Hyuk Suh, 2016: 53-54). Isu terkait proliferasi nuklir dan pengembangan persenjataan oleh Korea Utara serta rencana Korea Selatan bersama Amerika Serikat untuk mengembangkan THAAD (*Terminal High Altitude Area Defense*) sebagai sistem peluru kendali rudal balistik juga menjadi faktor yang menyebabkan konflik tetap berkelanjutan dengan intensitas yang tinggi hingga sampai saat ini. Rasa

curiga antara kedua negara menjadikan intensitas konflik terus terjadi. Bagi Korea Selatan, nuklir dan rudal Korea Utara merupakan sumber dilema terbesar keamanan. Sedangkan bagi Korea Utara, ancaman nyata ialah adanya aliansi Amerika Serikat dan Korea Selatan di Semenanjung Korea yang masih solid sehingga mendorong Korea Utara untuk meningkatkan kekuatan militernya dengan melakukan proliferasi Nuklir sebagai bentuk *self defense* (Hampson, Croker, Aall, Webel & Galtung, Ed. 2007: 113).

Keberadaan Amerika Serikat semakin membuat hubungan Korea Selatan dan Utara menjadi lebih kompleks. Terbukti dengan adanya pengiriman kapal induk *USS Carl Vinson* pada pertengahan tahun 2017 ke Semenanjung Korea sebagai bentuk respon dari Amerika Serikat terkait uji coba nuklir dan misil yang dilakukan oleh Korea Utara (Noerper, *Comparative Connection Pasific Forum CSIS*, Vol. 19, No. 1, May 2017 : 36).

Tindakan Korea Utara yang tidak dapat diprediksi juga membuat Semenanjung Korea menjadi *flash point* yang sangat berbahaya. Sehingga, perlu upaya untuk melakukan proses resolusi konflik dalam rangka menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea agar mampu menciptakan perdamaian positif diantara kedua negara. Proses perundingan untuk mencapai perdamaian di Semenanjung Korea telah dilakukan beberapa kali dengan melibatkan beberapa negara lainnya seperti China, Rusia, Amerika Serikat, dan Jepang. Ke empat negara tersebut turut menjembatani perundingan damai antara Korea Utara dan Korea Selatan, yang dikenal sebagai forum dialog *six party talk*. Namun, *six party talk* tidak lagi efektif ketika pada April 2009 Korea Utara memutuskan untuk keluar dari forum multilateral tersebut (Kearney, 2017: 18). Hal ini menunjukkan bahwa upaya membangun perdamaian yang selama ini dilakukan dalam tingkatan negara atau *track 1* di Semenanjung Korea tidak serta merta efektif.

Mengingat level negara tidak cukup berhasil dalam menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea maka tidak sedikit pula kelompok organisasi masyarakat sipil yang turut serta mengupayakan perdamaian melalui pendekatan di level *grassroot* yang melibatkan peran masyarakat sipil baik di kedua negara yang berkonflik dan juga dari masyarakat Internasional yang peduli terhadap perdamaian di Semenanjung Korea. Keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam intervensi konflik banyak dipengaruhi oleh perubahan paradigma operasi perdamaian yang sebelumnya hanya menempatkan PBB sebagai lembaga yang memonopoli kegiatan operasi perdamaian menjadi lebih dinamis dengan melibatkan peran masyarakat sipil dalam proses perdamaian sebagai *track II diplomacy* sesuai dengan fokus komunitas masyarakat tersebut. Pencegahan terjadinya kekerasan dan proses *peace building* tidak hanya merupakan tanggung jawab dari negara. Oleh karena itu, sebagai upaya membangun perdamaian di Semenanjung Korea selain dilakukan melalui *track I* juga melalui *track II* dengan melibatkan masyarakat sipil sebagai salah satu alternatif resolusi konflik.

Terdapat beberapa contoh yang menunjukkan keterlibatan masyarakat sipil dalam proses perdamaian yang cukup berhasil menciptakan dialog pihak berkonflik guna mencapai tahap rekonsiliasi demi mewujudkan perdamaian. Diantaranya ialah keterlibatan masyarakat sipil yang dalam hal ini ialah *the Regional Coordination for Economic and Social Research* (CRIES) yang juga merupakan salah satu anggota dari GPPAC dalam menginisiasi dialog akademik yang membahas terkait upaya resolusi dan rekonsiliasi hubungan Amerika Serikat dan Cuba di tahun 2009. Dengan melibatkan Universitas Amerika dan Universitas Havana yang kemudian disebut dengan TACE (*Taller Academico Cuba – Estados Unidos*) yang merupakan akronim bahasa spanyol dari *the umbrella of the Cuba – United States Academic Workshop*, TACE membangun dialog dan pertemuan-pertemuan yang dilakukan di Brazil dan beberapa tempat lainnya. Setelah diadakan beberapa kali pertemuan

antara tahun 2009 hingga 2013, dihasilkan beberapa konsensus dan rekomendasi terkait ketegangan hubungan antara Amerika Serikat dan Cuba yang dipresentasikan secara resmi di Washington D.C dan Havana (Serbin & Bourse. 2015: 18-39).

Hasilnya ialah, pada tahun 2013 Amerika Serikat dan Kuba sepakat untuk melakukan normalisasi hubungan setelah lebih dari 50 tahun kedua negara saling bermusuhan. TACE dianggap menjadi salah satu pihak yang turut berkontribusi, mengingat normalisasi tersebut juga dipengaruhi oleh adanya asimiliasi dari rekomendasi yang diberikan oleh TACE. Hal ini menunjukkan bahwa "*citizen diplomacy*" memang tidak dapat menggantikan diplomasi yang dilakukan secara resmi oleh pemerintah dalam menyelesaikan konfrontasi namun posisi dari "*citizen diplomacy*" lebih kepada membantu dalam mendorong serta mempercepat tindakan birokrasi dalam memperbaiki hubungan dan mengatasi ketegangan antara Amerika Serikat dan Kuba. Dengan demikian, masyarakat sipil mampu menjadi pendukung ataupun inisiator dalam proses perdamaian selain negara.

Sebagai upaya untuk membangun perdamaian di Semenanjung Korea, terdapat beberapa komunitas masyarakat sipil internasional yang terlibat diantaranya ialah GPPAC (*The Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict*) sebagai salah satu jaringan masyarakat sipil Internasional. Dalam rangka mencegah eskalasi konflik di semenanjung Korea, GPPAC berupaya untuk membangun kepercayaan dengan menggelar dialog perdamaian yang salah satunya digelar di *Ulaanbaatar* Mongolia. Inisiasi upaya perdamaian di Semenanjung Korea oleh GPPAC khususnya oleh GPPAC *Northeast Asia* (GPPAC NEA) dimulai pada tahun 2005 dan berlangsung hingga sampai saat ini (<http://www.gppac.net/ulaanbaatar-process>, diakses 15 Agustus 2017).

Setelah forum multilateral *six party talk* mengalami jalan buntu, maka tidak ada lagi mekanisme regional dan global yang secara khusus membahas mengenai permasalahan di Semenanjung Korea. Sehingga,

terdapat peluang yang cukup besar bagi masyarakat sipil internasional untuk turut berkontribusi dalam membangun perdamaian di Semenanjung Korea. Oleh karenanya, dalam penelitian ini akan menganalisa mengenai keterlibatan masyarakat sipil yang dalam hal ini ialah GPPAC (*The Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict*) dalam proses inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, intensitas ketegangan antara Korea Selatan dan Utara serta keberadaan Amerika Serikat di Semenanjung Korea berlangsung sangat fluktuatif dan jika terus dibiarkan tentu akan menimbulkan ancaman bagi stabilitas keamanan baik di kawasan dan juga global. Oleh karenanya, peneliti menilai bahwa untuk mencegah eskalasi konflik antara kedua negara semakin membesar maka proses perdamaian ialah sesuatu yang *urgent* dan harus dilakukan. Meskipun demikian setelah proses perdamaian yang dilakukan melalui level *track I* atau negara mengalami kegagalan, maka proses inisiasi perdamaian yang dilakukan oleh masyarakat sipil menjadi salah satu alternatif pendekatan dalam upaya mencapai perdamaian di Semenanjung Korea. Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penulis menetapkan dua pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana keterlibatan GPPAC (*Global Partnership for Prevention of Armed Conflict*) dalam inisiasi proses perdamaian di Semenanjung Korea?
- b. Bagaimana dinamika yang dihadapi GPPAC (*Global Partnership for Prevention of Armed Conflict*) dalam inisiasi proses perdamaian di Semenanjung Korea?

1.3. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisa keterlibatan GPPAC (*Global Partnership for Prevention of Armed Conflict*) dalam inisiasi proses perdamaian di Semenanjung Korea
- b. Untuk menganalisa dinamika yang di hadapi GPPAC (*The Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict*) dalam inisiasi proses perdamaian di Semenanjung Korea.

1.3.2. Signifikansi Penelitian

Penelitian mengenai upaya perdamaian atas konflik yang terjadi di Semenanjung Korea yang melibatkan Korea Utara dan Korea Selatan penting untuk dilakukan terkait kajian bidang damai dan resolusi konflik. Adapun yang menjadi signifikansi penelitian ini ialah berkaitan dengan aspek resolusi konflik yang diperankan oleh masyarakat sipil.

Dengan demikian, tesis ini dapat menunjukkan bahwa perdamaian bukan hanya perhatian dari negara saja sebagai otoritas pengambil kebijakan dalam tatanan elit sebuah negara. Namun, juga merupakan tanggung jawab bersama masyarakat dunia. Apabila perdamaian di level negara tidak mampu di wujudkan maka dapat di upayakan di level masyarakat. Hal ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk menciptakan perdamaian dalam sebuah konflik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana upaya dari masyarakat sipil dalam hal ini ialah GPPAC dalam inisiasi proses perdamaian di Semenanjung Korea dan bagaimana dinamika yang dihadapi dalam proses tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada seluruh komponen masyarakat dunia tidak terkecuali di Indonesia untuk turut ikut serta dan aktif berperan dalam proses membangun perdamaian di Semenanjung Korea. Meskipun secara geografis semenanjung Korea cukup jauh dari Indonesia, namun sebagai bagian dari komunitas Internasional, Indonesia turut memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga dan menciptakan perdamaian dunia.

Perdamaian bukan hanya urusan negara, warga negara juga harus ikut serta andil dalam mewujudkan perdamaian dunia, mengingat perdamaian merupakan tanggung jawab bersama, dan upaya menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea ialah salah satu bentuk kontribusi dalam membangun perdamaian dan menciptakan ketertiban dunia guna menjaga stabilitas keamanan di kawasan dan Internasional.

Selain itu, keterlibatan GPPAC dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea turut pula menandakan sebuah kenyataan bahwa hubungan yang dibangun tidak lagi terpengaruh dengan ideologi masing-masing negara, namun masyarakat sipil yang tergabung justru menekankan pada aspek *humanisme* atau kemanusiaan yang selama ini kurang diperhatikan melalui pendekatan *track 1* yang lebih banyak menggunakan pendekatan melalui paradigma kepentingan nasional dari segi keamanan, ideologi, dan politik.

Selain itu, Peningkatan kekuatan militer dan persenjataan yang dilakukan oleh Korea Utara dan tindakan uji coba ICMB (*Intercontinental Missile Balistic*) yang beberapa diantaranya dapat mencapai Indonesia salah satunya *Tepodong-4*, tentu menjadi catatan penting dan saran bagi Indonesia untuk turut terlibat dalam perdamaian di Semenanjung Korea. Baik dalam rana bilateral maupun multilateral dengan melibatkan institusi

regional seperti ASEAN+ dan ARF dimana Korea Utara dan Selatan menjadi anggota.

1.4.2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat akademis bagi penulis maupun dalam pemanfaatan landasan teoritis dan konseptual. Adapun manfaat akademis yang ingin dicapai melalui tesis ini antara lain ialah:

- a. Tesis ini secara akademis disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Master (S-2) bidang Pertahanan melalui program studi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan
- b. Mampu menunjukkan temuan penelitian yang signifikan terkait konflik di Semenanjung Korea dan menemukan alternatif resolusi konflik guna mewujudkan perdamaian antara Korea Utara dan Korea Selatan yang salah satunya ialah dengan melihat keterlibatan masyarakat sipil sebagai bagian dari GPPAC dalam inisiasi proses perdamaian di Semenanjung Korea.
- c. Penelitian ini juga diharapkan agar dapat menambah wawasan serta literatur dalam bidang kajian damai dan resolusi konflik, khususnya terkait resolusi konflik yang melibatkan masyarakat sipil dalam menciptakan perdamaian di rana hubungan internasional guna mewujudkan pertahanan serta stabilitas kemanan regional dan global.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini berkaitan dengan kajian mengenai damai dan resolusi konflik. Sehingga, yang menjadi fokus dalam penelitian ini terletak pada perdamaian di Semenanjung Korea. Mengingat, konflik Semenanjung Korea sendiri merupakan bagian dari ancaman yang berasal dari lingkungan strategis global yang perlu untuk

diwaspadai dan diselesaikan tidak hanya melalui level negara saja, melainkan juga dalam level *grassroot* atau masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data pendukung diperoleh dari berbagai macam sumber, baik yang sifatnya sekunder yang diperoleh dari kegiatan studi pustaka dan juga sumber data primer dari hasil kegiatan seminar, serta wawancara dengan narasumber yang dianggap kredibel berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga akan menjelaskan mengenai dinamika terkait ruang lingkup proses perdamaian yang melibatkan masyarakat sipil.